



**DINAS KOPERASI UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD)
TAHUN 2023**



Jl. Mawar No. 1, Way Mengaku.
Telp/Fax. (0728) 21086, Liwa



Diskoperindag Lambar



@dinaskoperindag_lambar



www.diskoperindag.lambungbaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas petunjuk dan pertolonganNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Liwa, Februari 2022

KEPALA DINAS
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TRI UMARYANI, S.P, M.Si
NIP.19751229 199902 2 001

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Undang-undang mengamanatkan untuk membuat dan menyusun perencanaan pembangunan daerah secara periodik yang akan digunakan sebagai acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan RKPD tahun berjalan maka setiap satuan kerja perangkat daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja OPD.

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu perangkat satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat segera menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-

2022 yang selanjutnya akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja yang disusun saat ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan Renja OPD ini memerlukan pemikiran yang matang untuk mensinergikan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Perencanaan kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi diawali dengan penataan program dari tingkat pusat di kementerian terkait sampai ke tingkat kabupaten di tingkat pelaksana yang ada pada satuan kerja. Penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 ini mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang sangat teknis yaitu pada urusan wajib Koperasi dan urusan pilihan industri dan perdagangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023 mengacu pada Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2. Tujuan

Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN RENJA OPD

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan capaian Renstra OPD

2.1.1 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkiraan Pencapaian Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(INTERMEDIET)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGAWSAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Aktif	27 %	31,52 %	116
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang Aktif	51%	52%	101
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	20 Unit	20 Unit	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan koperasi	2%	2,48%	51
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi baru	5 Koperasi	5 Koperasi	100
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Jumlah Koperasi yang dibina	42 Unit	42 Unit	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah KUMKM yang difasilitasi pembiayaan	330 KUMKM	589 KUMKM	178
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Jumlah UMKM yang dibina	214 KUMKM	214 KUMKM	100

	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku				
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengakses dana bergulir PP-KUMKM	40 KUMKM	5 KUMKM	12
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang tersosialisasi	214 UMKM	224 UMKM	104

Pencapaian Jangka Menengah (Renstra)

Perkiraan Pencapaian Indikator Kinerja Program Sesuai Target Renstra

OPD tahun 2022 bisa dilihat pada tabel berikut :

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Rencana Realisasi	%
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Aktif	30%	30%	100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang Aktif	53%	53%	100
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	23Unit	23Unit	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan koperasi	10%	10%	100
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi baru	17 Koperasi	17 Koperasi	100
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Jumlah Koperasi yang dibina	90 Unit	90 Unit	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah KUMKM yang difasilitasi pembiayaan	340 KUMKM	340 KUMKM	100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah UMKM yang dibina	9350 KUMKM	9350 KUMKM	100

	Pemangku				
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengakses dana bergulir PP-KUMKM	40 KUMKM	40 KUMKM	100
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang tersosialisasi	250 UMKM	250 UMKM	100

2.1.2 Urusan Pilihan Perdagangan

Perkiraan Pencapaian Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 urusan pilihan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Bertipe A	1 Pasar	0 Pasar	0
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun / direhab / revitalisasi	2 Pasar	3 Pasar	150
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pasar	2 Pasar	3 Pasar	150
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Kebersihan Pasar Pemda	24 Orang	24 Orang	100
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Pemda	10 Pasar	10 Pasar	100
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar Pemda	22 Orang	22 Orang	100
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Perubahan Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok dan Barang Penting	≤5	0,412	100
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	14 Jenis	14 Jenis	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	5 Kali	5 Kali	100
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Harga Sembako	48 Kali	48 Kali	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jenis produk UMKM yang Terfasilitasi	10 %	69 %	690
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	2 Kali	1 Kali	50
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	1 Kali	0 Kali	0

	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagan Lokal	1 Kali	1 Kali	100
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang Tertera Sah	3,1 %	3,8 %	122
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur UTTP Tertera Sah	120 Unit	158 Unit	131
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera tera Ulang	12 Kali	12 Kali	100
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peserta Penyuluhan Metrologi Legal	100 Orang	100 Orang	100

Perkiraan capaian kinerja program sampai dengan tahun anggaran 2022 (Renstra) dilihat pada tabel berikut:

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KE GIATAN (OUTPUT)	Target	Rencana Realisasi	%
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar yang Bertipe A	1 Pasar	1 Pasar	100
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun / direhab / revitalisasi	8 Pasar	8 Pasar	100
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah penyediaan sarana dan prasarana pasar	10 Pasar	10 Pasar	100
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Kebersihan Pasar Pemda	24 Orang	24 Orang	100
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Pemda	10 Pasar	10 Pasar	100
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Pasar Pemda	22 Orang	22 Orang	100
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Perubahan Harga Rata-Rata Bahan Pangan Pokok dan Barang Penting	≤5	0,412	100
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	14 Jenis	14 Jenis	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	25 Kali	25 Kali	100

	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Harga Sembako	240 Kali	240 Kali	100
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jenis produk UMKM yang Terfasilitasi	50 %	50 %	100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang	10 Kali	10 Kali	100
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	5 Kali	5 Kali	100
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	5 Kali	5 Kali	100
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat UTTP yang Tertera Sah	3,6 %	3,6 %	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur UTTP Tertera Sah	140 Unit	140 Unit	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera tera Ulang	14 Kali	14 Kali	100
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peserta Penyuluhan Metrologi Legal	100 Orang	100 Orang	100

2.1.3 Urusan Pilihan Industri

Perkiraan Pencapaian Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 urusan pilihan Industri dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4 %	4,1 %	102
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	0 %	0 %	0
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Centra IKM	2 Buah	2 Buah	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Alat Produksi IKM	23 Unit	23 Unit	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang Dibina	165 IKM	165 IKM	100

Pencapaian Jangka Menengah (Renstra)

Perkiraan Pencapaian Indikator Kinerja Program Sesuai Target Renstra (sampai tahun 2022) OPD bisa dilihat pada tabel berikut :

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KE GIATAN (OUTPUT)	Target	Rencana Realisasi	%
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	20 %	20 %	100
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	0 %	0 %	0
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Centra IKM	2 Buah	2 Buah	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Alat Produksi IKM	24 Unit	24 Unit	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang Dibina	170 IKM	170 IKM	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perkiraan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target capaian setiap Tahun	Realisasi	%
(1)	(2)	(4)		
1.	Jumlah Koperasi Yang Sehat	25	25	100%
2.	Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	10%	10%	100%
3.	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan (dalam milyar)	905,17	905,17	100%
4.	Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri (dalam milyar)	365,57	365,57	100%

Tabel diatas merupakan perkiraan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun pertama Renstra Dinas periode tahun 2023 – 2026.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan mengacu pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat serta sasaran RPJMD, maka **isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi** di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

- a. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Keberadaan usaha koperasi sebagai Badan Hukum resmi yang diakui negara merupakan bukti keseriusan pemerintah membangun ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Namun sangat disayangkan Hadirnya koperasi belum terlihat memberikan dampak nyata pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung barat. Permasalahan ini disebabkan banyak hal, diantaranya pengelolaan kelembagaan koperasi yang belum sesuai aturan, pemilihan sektor usaha yang masih didominasi usaha simpan pinjam, sampai pada pembentukan unit koperasi yang hanya untuk kepentingan tertentu seperti mengakses program pemerintah saja.

Berdasarkan data keragaan Koperasi yang disusun Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 tercatat jumlah koperasi di Lampung Barat sebanyak 165 unit, dengan kondisi 53 unit koperasi aktif, 38 unit koperasi tidak aktif, 74 koperasi dalam status diusulkan untuk dibubarkan.

Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup serius bagi Dinas Koperindag Lampung Barat, diperlukan kebijakan yang tepat agar Koperasi di Kabupaten Lampung Barat bisa memberikan dampak dan menjadi solusi perekonomian masyarakat dan daerah

- b. Sektor UMKM adalah sektor yang sangat strategis dalam menopang ekonomi daerah. Kabupaten Lampung barat masih menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada sektor pertanian, untuk itu salah satu strategi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah menggerakkan sektor usaha yang sifatnya menghasilkan produk baru dari bahan mentah atau komoditas. Untuk itu diperlukan sebuah upaya untuk mendorong pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Pokok permasalahan UMKM Kabupaten Lampung Barat adalah permodalan dan pemasaran. Dua hal ini menjadi konsentrasi kebijakan pemerintah sehingga UMKM bisa naik kelas dan menjadi penopang ekonomi daerah bahkan nasional.

2. Urusan Pilihan Perdagangan

Berbicara masalah perdagangan, isu strategis yang berkembang adalah permasalahan kontribusi sektor perdagangan. Adapun hal yang menjadi pendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan antara lain perlindungan konsumen, merupakan satu diantara kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Iklim usaha yang sehat harus didukung oleh tingkat persaingan usaha yang sehat dan juga meminimalisir pelanggaran hak – hak konsumen. Konsumen yang cerdas dan terlindungi merupakan bagian dari permasalahan yang ada dan harus dilakukan upaya stategis untuk mewujudkannya, melalui kebijakan optimalisasi tertib niaga. Selanjutnya hal krusial untuk mendukung PDRB sektor perdagangan adalah masalah ketersediaan stok hingga stabilitas harga merupakan isu penting dalam kebijakan perdagangan dalam negeri. Pemerintah harus hadir dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan masyarakat,

terutama dalam kondisi – kondisi tertentu, seperti saat masa gagal panen, masa menjelang dan saat bulan Ramadhan serta Hari Raya dan Tahun Baru dimana trend yang terjadi adalah kelangkaan barang dan kenaikan harga. Selain itu, permasalahan harga komoditas pertanian juga menjadi hal yang sangat krusial dalam perekonomian Lampung Barat, untuk itu pemutusan mata rantai distribusi barang komoditas pertanian menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas harga – harga komoditas tersebut.

3. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Perindustrian merupakan satu dari berbagai sektor usaha bagi UKM. Kabupaten Lampung Barat bukan merupakan wilayah pengembangan industri skala besar, mengingat 65% wilayahnya merupakan daerah konservasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang harus tetap lestari. Akan tetapi Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil bahan baku industri agro yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Kabupaten Lampung Barat adalah wilayah pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis agroindustri. Jumlah IKM Kabupaten Lampung Barat per Desember 2021 adalah 823 IKM yang tersebar di Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Pertumbuhan dan peningkatan omset IKM diharapkan mampu untuk meningkatkan share PDRB sektor industri di Lampung Barat, yang artinya akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan omset IKM tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terlampir

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat pada kegiatan Forum Gabungan OPD/DESK sebagai rangakaian Musrenbang Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah usulan
1.	Kredit Lunak Bagi Koperasi dan UMKM	3 usulan
2.	Bantuan Alat Produksi Bagi UMKM/IKM	2 usulan
3.	Pelatihan UMKM	2 usulan
4.	Pembangunan/rehabilitasi Pasar Pemda	4 usulan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN	SUMBER	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Renstra Koperasi UKM	
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu berdaya saing di pasar Domestik dan Global		
3	Terwujudnya kementerian koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi		
1	Kebijakan pengembangan sumber daya industri	Renstra Kementerian Perindustrian	
2	Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri		
3	Kebijakan pemberdayaan industri		
4	Kebijakan pengembangan perwilayahinan industri produk nasional		
5	Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal		
6	Kebijakan reformasi birokrasi		

3.5 Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi
2. Meningkatnya penerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi

3. Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional
4. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri
5. Menigkatnya jumlah UKM yang dibina, dan
6. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM
7. Pemantauan harga bahan pangan pokok penting
8. Peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen
9. Pertumbuhan ekspor melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita Sasaran :
 - a. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - b. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Rencana target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 4.1 Target Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita	Pendapatan Perkapita	26,78 juta	28,04 juta	29,42 juta	30,92 juta

3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan sektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdaganga yang sejalan dengan RPJM Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, maka untuk program prioritas tahun 2023 baik melalui dana APBD maupun APBN, Dinas

Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan program-program sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - ✓ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - ✓ Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Pengadaan Mebel
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - ✓ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- i) Peningkatan Pelayanan BLUD
- ✓ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- 2) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
- ✓ Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota
- 3) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- b) Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO
- a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
- ✓ Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- ✓ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- ✓ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- ✓ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- ✓ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

5) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- ✓ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

6) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - ✓ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - ✓ Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya
 - ✓ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - ✓ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

7) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- a) Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota
 - ✓ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
 - ✓ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - ✓ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

8) PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

a) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

- ✓ Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
- ✓ Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

9) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- ✓ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- ✓ Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

10) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

b) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry
- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry
- ✓ Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Intermediet) dan Subkegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pendapatan Perkapita		94.744.044.400.
	% Koperasi yang sehat	30%	409.340.500
	% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	980.075.000
	% Pertumbuhan UMKM	10%	7.891.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	77,92	3.945.203.900
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	14.000.000
	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 dokumen	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	2.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	2.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	2.979.193.900
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	2.973.693.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 laporan	2.500.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	1.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	2.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	12.990.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	2.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	10.990.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	25.000.000
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	345.020.000
	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	
	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen	

	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 paket	2.200.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	65.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 dokumen	95.220.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	7.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	125.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	5 paket	95.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	30.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	35.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	224.000.000
	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat	12 laporan	2.000.000

	menyurat		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	62.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	160.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	36 unit	215.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	30.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	35.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	35.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	35.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	33%	100.000.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	50 unit usaha	100.000.000
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan	50 unit usaha	100.000.000

	kabupaten/kota		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	2%	229.340.500
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	4,04%	229.340.500
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	80 orang	229.340.500
PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	9%	80.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	45 orang	80.000.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukrisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	45 orang	80.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM terfasilitasi	3,00%	980.075.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	9.622 unit usaha	980.075.000
	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10 unit usaha	

	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	25 unit usaha	
	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	330 unit usaha	
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	25 orang	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	2.600. unit usaha	200.000.000
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10 unit usaha	135.000.000
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	25 unit usaha	50.000.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	330 unit usaha	207.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	100 orang	388.075.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase wirausaha pemula	0,25%	7.891.000.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.600. unit usaha	7.891.000.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.600. unit usaha	7.891.000.000

	Desain dan Teknologi		
	PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	887.433	77.863.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi	20,00%	76.695.000.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	76.530.000.000
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	76.500.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 unit	30.000.000
Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	165.000.000
	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	135.000.000
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1 dokumen	30.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	3%	550.000.000
Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan	438.575.000
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1	48 Laporan	

	(satu) kabupaten/kota		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	48 Laporan	72.900.000
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Laporan	365.675.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	111.425.000
	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	5 laporan	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	51.425.000
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	5 laporan	60.000.000
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	3,99%	238.500.000
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	185 unit	238.500.000
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	185 unit	155.500.000
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	100 orang	83.000.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	4,40%	380.000.000

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	380.000.000
	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM	260.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM	120.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	4%	6.125.000.000
	Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	2%	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	6.125.000.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	1 Dokumen	5.125.000.000

prasarana industri	pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri		
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	800.000.000

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun) 2023
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Administrasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, target 11 dokumen
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen RKA-SKPD target 1 dokumen
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD Target 1 dokumen
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Target 1 dokumen
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD Target 1 dokumen
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi penyusunan evaluasi perangkat daerah target

		12 laporan
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 35 orang/bulan
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun target 1 laporan
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD Target 1 laporan
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Target 1 dokumen
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan asuransi ruko milik Pemda Target 1 dokumen (12 ruko)
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.17.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai target 1 dokumen evaluasi
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman peserta diklat pegawai sebanyak 2 orang
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan instalasi listrik kantor (kabel, lampu,dll) 3 paket
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan 2 paket, terdiri dari Pengadaan Laptop (2 unit), Scanner portable (1unit) kabel data printer 3M (2 unit), kabel HDMI (2 unit) dan Printer (1 unit)
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan (2 paket)
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Langganan surat kabar selama 1 tahun dan kegiatan publikasi OPD (4 SKHU 8 paket Biaya publikasi dan 2 kali Publikasi Iklan)
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan kudapan untuk sajian tamu dinas. Target 1 laporan pelaksanaan kegiatan
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan dinas dalam dan luar daerah (target kinerja 1 laporan pelaksanaan kegiatan)
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel berupa meja resepsionis/front office (1 unit), lemari arsip (1 unit), kursi ½ biro (2 unit), kursi 1 biro (1 unit)
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya (mesin penghancur kertas (1 unit), alat metrologi (5 unit)
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor berupa pemasangan kanopi parkir (75 meter)
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Administrasi Jasa Surat menyurat (ATK dan jasa pengiriman) kinerja 1 laporan kegiatan
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya langganan telpon, internet dan air Target 1 laporan
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi operasional rutin
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya BBM, perizinan dan servis kendaraan dinas (11 unit kendaraan, 4 mobil 7 motor)
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan computer (5 unit), laptop (5 unit), mesin lamban kemasan (2 unit)
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan rutin bangunan kantor (pemeliharaan plafond ruang rapat 200 meter, rehab kloset kamar mandi kepala dinas, pemasangan wallpaper ruang kepala dinas (15 roll). Pemeliharaan lamban kemasan (rehab septi tank)
2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional BLUD bersumber pendapatan Jasa BLUD
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Penilaian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan kepatuhan lembaga koperasi

	Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	terhadap undang – undang dan regulasi koperasi. Termasuk Rakor Koperasi tingkat kabupaten target 50 unit koperasi
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial pengelolaan dan koperasi pengurus koperasi, target 80 orang pengurus koperasi
2,17,06	PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI	
2,17,06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2,17,06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM, serta pendampingan usaha, perkuatan permodalan, serta pengembangan usaha koperasi dan UMKM target 45 orang
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan UMKM, serta penyusunan profil Koperasi dan UMKM
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kegiatan Operasional, monitoring dan evaluasi terkait perlakuan BLUD KUMKM dan audit eksternal BLUD, optimalisasi penagihan pengembalian dana bergulir UPT BLUD. Target 10 unit mitra BLUD
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk UMKM (NIB, P-IRT, Halal, Ijin edar, Barcode dan HKI) target 25 unit usaha
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM, berupa sosialisasi

	Usaha Mikro	dan pendampingan UMKM untuk mengakses permodalan, pendampingan pengembangan UMKM serta Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan factory sharing
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi wira usaha pemula untuk menumbuhkan UMKM target 25 orang
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Pembangunan PLUT, Sarpras PLUT bersumber dana DAK Fisik Koperasi UKM, Jasa Perencanaan dan Pengawasan serta biaya koordinasi program
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi ruko, kios, dan los serta sarana pendukungnya di pasar milik pemda target 2 unit (pasar). Dana DAK Fisik Tahun 2023,
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan sarana perdagangan bagi UMKM target 5 unit bantuan sarana distribusi perdagangan bagi PKL
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalisasi pengelolaan pasar pemda, honor tenaga Pengelola Sampah terpadu 1 orang, penyediaan sarana kebersihan sebanyak 294 unit, serta optimalisasi kinerja pengelola pasar untuk mencapai target PAD
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan petugas kebersihan pasar dalam mengolah sampah menjadi lebih bersih dan bernilai ekonomi target (30 peserta)

3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pelaksanaan pemantauan stok sembako sebanyak 48 kali, honor petugas pendata 5 orang, koordinasi ketersediaan stok dan harga barang
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar reguler sebanyak 1.700 paket sembako
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Pengawasan legalitas distributor, koordinasi permasalahan seputar kelembagaan maupun hal lainnya terhadap distributor pupuk dan pestisida Target 1 dokumen
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan ketersediaan, penyaluran dan ketepatan penerima manfaat pupuk dan pestisida ditingkat kios, maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam hal monev penyaluran ditingkat petani Target 1 laporan
3.30.06.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang serta kalibrasi alat UTTP target 185 unit
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Sosialisasi UTTP di tingkat pedagang pasar, pengawasan UTTP, target 100 orang, serta koordinasi seputar UTTP
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Pameran tingkat nasional 2 kali, tingkat lokal 1 kali

	Kabupaten/Kota	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Perjalanan dinas dalam rangka promosi produk UMKM ke pasar modern, ritel dan distributor lainnya. Fasilitasi penyusunan Katalog Produk UMKM serta fasilitasi produk UMKM masuk ke e-katalog nasional target 15 UMKM
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Honor TPL 4 orang, Pelatihan anyaman plastik target 20 peserta, pelatihan olahan pisang 20 orang, Evaluasi Dokumen RPIK.
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	DAK Fisik IKM, Bantuan Alat Produksi sebanyak 114 unit, optimalisasi lamban kemasan dalam bentuk honor petugas 6 orang, operasional dan belanja bahan cetak 1 tahun, pengadaan mesin sablon 1 unit.
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pembinaan IKM target 165 IKM. Hibah Dekranasda dan Hibah Rumah Kreatif

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2023 ini disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaaan Renja Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Hasil kinerja Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang telah disusun akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Kerja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku ekonomi di Kabupaten Lampung Barat dengan meningkatnya peran bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Lampung Barat secara signifikan.

Penulis juga menyadari atas segala kekurangan dalam penyampaian pada Renja Tahun 2023, maka mohon kiranya kritik serta saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan berikutnya.

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Lampung Barat

Dinas Koperasi UKM, Perinduatrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan tahun 2018 s/d 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program Kegiatan dan Subkegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Subkegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	3 bidang	3 bidang	3 bidang	3 bidang	100%	3 bidang	3 bidang	100%
2.17.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

2.17.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52 dokumen	52 dokumen	52 dokumen	52 dokumen	100%	52 dokumen	52 dokumen	100%
2.17.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.17.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
2.17.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	100%	31 orang/bulan	31 orang/bulan	100%
2.17.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

2.17.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.17.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
2.17.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaian nya	31 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
2.17.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang	100%
2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Organisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 sub	6 sub	6 sub	6 sub	100%	6 sub	6 sub	100%
2.17.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
2.17.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100%
2.17.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100%

2.17.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	100%
2.17.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
2.17.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
2.17.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100%	0 unit	0 unit	100%
2.17.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub.Bidang yang tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 sub	3 sub	3 sub	3 sub	100%	3 sub	3 sub	100%
2.17.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.17.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub	3 sub	3 sub	3 sub	100%	3 sub	3 sub	100%
2.17.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	100%
2.17.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
2.17.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
2.17.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Kerja BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
2.17.01.2.1 0.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	100%	1 unit kerja	1 unit kerja	100%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	30,3%	30,3%	30,3%	30,3%	100%	30,3%	30,3%	100%

2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	39 unit usaha	39 unit usaha	39 unit usaha	39 unit usaha	100%	39 unit usaha	39 unit usaha	100%
2.17.03.2.0 1.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	52 unit usaha	52 unit usaha	52 unit usaha	52 unit usaha	100%	52 unit usaha	52 unit usaha	100%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	10 unit usaha	10 unit usaha	100%
2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Pengurus Koperasi yang kompetensinya meningkat	18,18%	18,18%	18,18%	18,18%	100%	18,18%	18,18%	100%
2.17.05.2.0 1.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	100%	90 orang	90 orang	100%

2,17,06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	10 unit usaha	10 unit usaha	0%
2,17,06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memiliki peningkatan pengetahuan manajemen usaha	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2,17,06.2.0 1.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM terfasilitasi	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	10,00%	10,00%	100%
		Persentase wirausaha pemula	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	100%	0,45%	0,45%	100%

2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Produk UMKM yang memenuhi perizinan / sertifikasi	0 produk	0 produk	0 produk	0 produk	0%	0 produk	0 produk	0%
2.17.07.2.0 1.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	8,747 unit usaha	8,747 unit usaha	8,747 unit usaha	8,747 unit usaha	100%	8,747 unit usaha	8,747 unit usaha	100%
2.17.07.2.0 1.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	38 unit usaha	38 unit usaha	38 unit usaha	38 unit usaha	100%	38 unit usaha	38 unit usaha	100%
2.17.07.2.0 1.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	100%	25 unit usaha	25 unit usaha	100%
2.17.07.2.0 1.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	812 unit usaha	812 unit usaha	812 unit usaha	812 unit usaha	100%	812 unit usaha	812 unit usaha	100%

2.17.07.2.0 1.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase Pasar Rakyat yang direvitalisasi	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	100%	11,69%	11,69%	100%
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang direvitalisasi	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit	100%	52 unit	52 unit	100%
3.30.03.2.0 1.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 unit	52 unit	52 unit	52 unit	100%	52 unit	52 unit	100%
3.30.03.2.0 1.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	unit	unit	unit	0%	unit	unit	0%
3.30.03.2.0 2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah Pasar milik Pemerintah yang terkelola sesuai standar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0 pasar	0%	0 pasar	0 pasar	0%

3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
3.30.03.2.0 2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0 dokumen	0%
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	100%	0,14%	0,14%	100%
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Dokumen laporan ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok, dan barang penting	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.30.04.2.0 2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
3.30.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0% 0 kali	0 kali	0 kali	0% 0 kali
3.30.04.2.0 3.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0% 0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0% 0 dokumen
3.30.04.2.0 3.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0% 0 laporan	0 laporan	0 laporan	0% 0 laporan
3.30.06.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	6%	6%	6%	6%	100%	6%	6%	100%
3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah dokumen UTTP	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
3.30.06.2.0 1.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	542 unit	542 unit	542 unit	542 unit	100%	542 unit	542 unit	100%
3.30.06.2.0 1.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	400 orang	100%
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	100%	3,28%	3,28%	100%

3.30.07.2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah produk yang dipromosikan	27 produk	27 produk	27 produk	27 produk	100%	27 produk	27 produk	100%
3.30.07.2.0 1.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	100%	9 UMKM	9 UMKM	100%
3.30.07.2.0 1.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	9 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	100%	9 UMKM	9 UMKM	100%
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
		PDRB Sektor Industri (miliar rupiah)	351.349,8	351.349,8	351.349,8	351.349,8	100%	351.349,8	351.349,8	100%
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	16,02%	16,02%	16,02%	16,02%	100%	16,02%	16,02%	100%
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%

3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Sentra IKM dioptimalisasi	2 sentra	2 sentra	2 sentra	2 sentra	100%	2 sentra	2 sentra	100%
3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TRI UMARYANI, S.P, M.Si

NIP. 19751229 199902 2 001

LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
										Nasional	Daerah				Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		77,95	77,91	77,91	77,92	3.930.199.900	Lampung Barat	APBD			Aparatur	77,93	4.238.519.890	Dinas Koperindag			
2.17.01.2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	52 dokumen	13 dokumen	10 dokumen	14.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	10 dokumen	15.400.000	Dinas Koperindag			
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen							1 dokumen						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen							1 dokumen						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen							1 dokumen						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen							1 dokumen						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan							1 laporan						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 laporan	4 Laporan	4 Laporan	10 laporan							10 laporan						
2.17.01.2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen	52 dokumen	13 dokumen	10 dokumen	2.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	10 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag			
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12					14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen		2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen		2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen		2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan		2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 laporan	4 Laporan	4 Laporan	10 laporan	2.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	10 laporan	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	2.979.193.900	Lampung Barat	APBD				Aparatur	31 orang/bulan	3.277.113.290	Dinas Koperindag		
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan								1 laporan				
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan								1 laporan				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen								1 dokumen				
2.17.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	31 orang/bulan	2.973.693.900	Lampung Barat	APBD				Aparatur	31 orang/bulan	3.271.063.290	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan		2.500.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan	2.750.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan		1.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan	1.100.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen		2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 dokumen	2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	12.986.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 dokumen	14.084.600	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/ Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Masyarakat	1 dokumen	2.000.000			
2.17.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2.000.000	Lampung Barat	APBD									
2.17.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	10.986.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 dokumen	12.084.600	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	4 orang	4 orang	2 orang	10.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	2 orang	11.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 5.05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	15.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 dokumen	16.500.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	4 orang	4 orang	2 orang	10.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	2 orang	11.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	3 paket	345.020.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	3 paket	330.022.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	2 paket								2 paket				
		Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	2 paket								2 paket				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	4 dokumen								4 dokumen				
		Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan								1 laporan				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan								1 laporan				
2.17.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	3 paket	2.200.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	3 paket	2.420.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	2 paket	50.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	2 paket	55.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	2 paket	65.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	2 paket	71.500.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	4 dokumen	95.220.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	4 dokumen	104.742.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	7.600.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 laporan	8.360.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	125.000.000	Lampung Barat	APBD				Aparatur	1 laporan	137.500.000	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKP/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKP/ Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12					14	15	16
1 2.17.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 paket	2 paket	0 paket	1 paket	95.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	0 paket		71.500.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 paket	0 unit	0 unit	2 unit							2 unit					
		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 unit	7 unit	7 unit	2 unit							2 unit					
2.17.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 paket	2 paket	0 paket	1 paket	30.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	0 paket		-	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 paket	0 unit	0 unit	2 unit	30.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	2 unit		33.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 unit	7 unit	7 unit	2 unit	35.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	2 unit		38.500.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	224.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan		246.400.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan							1 laporan					
		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan							1 laporan					
2.17.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	2.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan		2.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	62.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan		68.200.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1 laporan	160.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	1 laporan		176.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	215.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	22 unit		208.450.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	4 unit	4 unit	6 unit							7 unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit							3 unit					
2.17.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	150.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	22 unit		165.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.01.2.0 9.06	pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	4 unit	4 unit	6 unit	30.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	7 unit		33.000.000	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
2.17.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	7	35.000.000	Lampung Barat	APBD			Aparatur	3 unit	38.500.000	Dinas Koperindag			
2.17.01.2.1 0	peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	35.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 unit kerja	38.500.000	Dinas Koperindag			
2.17.01.2.1 0.01	pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penujang pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	35.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 unit kerja	38.500.000	Dinas Koperindag			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi aktif	36%	30,3%	30,3%	33%	100.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	34%	55.000.000	Dinas Koperindag			
2.17.03.2.0 1	Pemeriksaan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	60 unit usaha	52 unit usaha	23 unit usaha	43 unit usaha	100.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	53 unit usaha	55.000.000	Dinas Koperindag			
2.17.03.2.0 1.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	60 unit usaha	52 unit usaha	23 unit usaha	50 unit usaha	100.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	53 unit usaha	55.000.000	Dinas Koperindag			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Percentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya	0%	0%	0%	2%	45.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	4%	121.000.000	Dinas Koperindag			
2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasi Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasi	80 orang	90 orang	42 orang	20 orang	45.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	20 orang	49.500.000	Dinas Koperindag			
2.17.05.2.0 1.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasi serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasi	80 orang	90 orang	42 orang	20 orang	45.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	20 orang	49.500.000	Dinas Koperindag			
2.17.06	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%	6,06%	6,06%	6,5%	9%	80.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	12 unit usaha	71.500.000				
2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	180 orang	0 orang	0 orang	45 orang	80.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	45 orang	71.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Masyarakat	45 orang	71.500.000			
2.17.06.2.0 1.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	180 orang	0 orang	0 orang	45 orang	80.000.000	Lampung Barat	APBD									
2.17.07	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase UMKM terfasilitasi	12,00%	10,00%	10,00%	3,00%	602.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	0	511.500.000	Dinas Koperindag		
		Persentase wirausaha pemula	1,00%			0,25%		Lampung Barat	APBD				Masyarakat	0,25%		Dinas Koperindag		
2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	12.806 unit usaha	8.747 unit usaha	8.747 unit usaha	9.622 unit usaha	602.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	10.584 unit usaha	511.500.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha	38 unit usaha	38 unit usaha	10 unit usaha								10 unit usaha				
		Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	111 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha								27 unit usaha				
		Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	1.419 unit usaha	812 unit usaha	812 unit usaha	330 unit usaha								361 unit usaha				
		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	100 orang	40 orang	40 orang	25 orang								25 orang				
2.17.07.2.0 1.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	12.806 unit usaha	1.500 unit usaha	2.000 unit usaha	2.600. unit usaha	200.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	5.200 unit usaha	220.000.000	Dinas Koperindag		
2.17.07.2.0 1.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha	38 unit usaha	38 unit usaha	10 unit usaha	135.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	10 unit usaha	148.500.000	Dinas Koperindag		
2.17.07.2.0 1.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan	111 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	50.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	27 unit usaha	55.000.000	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.17.07.2.0 1.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	1.419 unit usaha	812 unit usaha	812 unit usaha	330 unit usaha	167.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	361 unit usaha	18.370.000	Dinas Koperindag			
2.17.07.2.0 1.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengertahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	100 orang	40 orang	40 orang	25 orang	50.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	25 orang	55.000.000	Dinas Koperindag			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase wirausaha pemula	1,00%	0,25%	0,45%	0,25%	7.891.000.000	Lampung Barat	APBD/DAK			Masyarakat		0,50%	8.680.100.000	Dinas Koperindag		
2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.750 unit usaha	2.600. unit usaha	2.000 unit usaha	2.600. unit usaha	7.891.000.000	Lampung Barat	APBD/DAK			Masyarakat	5.200 unit usaha	8.680.100.000				
2.17.08.2.0 1.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.750 unit usaha	2.600. unit usaha	2.000 unit usaha	2.600. unit usaha	7.891.000.000	Lampung Barat	APBD/DAK			Masyarakat	5.200 unit usaha	8.680.100.000				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
		PDRB Sektor Perdagangan (miliar rupiah)	941.750,5	870.031,9	870.031,9	887.432,5	1.743.500.000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten	APBD			Masyarakat	905.181	1.704.750.000	Dinas Koperindag			
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	6,29%	11,69%	10,00%	20,00%	595.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat		40%	654.500.000	Dinas Koperindag		
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	52 unit	2 unit	2 unit	430.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	2 unit	473.000.000	Dinas Koperindag			
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 unit	271 unit	0 unit	5 unit							5 unit					
3.30.03.2.0 1.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 unit	52 unit	52 unit	2 unit	400.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	2 unit	440.000.000	Dinas Koperindag			
3.30.03.2.0 1.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 unit	52 unit		5 unit	30.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	5 unit	33.000.000	Dinas Koperindag			
3.30.03.2.0 2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	165.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 dokumen	181.500.000	Dinas Koperindag			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen							1 dokumen					
3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	135.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 dokumen	148.500.000	Dinas Koperindag		
3.30.03.2.0 2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	30.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 dokumen	33.000.000	Dinas Koperindag		
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	<3%	0,14%	0,14% <3%		550.000.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	<3%	535.000.000	Dinas Koperindag		
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	438.575.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 Laporan	405.000.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan							1 Laporan					
3.30.04.2.0 2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	72.900.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 Laporan	65.000.000	Dinas Koperindag		
3.30.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	365.675.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 Laporan	340.000.000	Dinas Koperindag		
3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	111.425.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 dokumen	130.000.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan							1 laporan					
3.30.04.2.0 3.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	51.425.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	1 dokumen	65.000.000	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	3.30.04.2.0	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 laporan	0 laporan	0 laporan	1 laporan	60.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 laporan	65.000.000	Dinas Koperindag		
	3.30.06.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	% Alat UTTP tertera sah	35,29%	6%	11,71%	3,99%	238.500.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	5,07%	270.250.000	Dinas Koperindag		
1	3.30.06.2.0	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	1640 unit	542 unit	542 unit	185 unit	238.500.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	385 unit	270.250.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	400 orang	100 orang	100 orang							100 orang					
1.01	3.30.06.2.0	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	1640 unit	542 unit	542 unit	185 unit	155.500.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	385 unit	178.250.000	Dinas Koperindag		
1.02	3.30.06.2.0	Pengawasan/Penyaluran Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	400 orang	100 orang	100 orang	83.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	100 orang	92.000.000	Dinas Koperindag		
	3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	25,10%	3,28%	3,28%	4,40%	360.000.000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten	APBD			Masyarakat	5,70%	410.000.000	Dinas Koperindag		
1	3.30.07.2.0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	78 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM	360.000.000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten	APBD			Masyarakat	18 UMKM	410.000.000	Dinas Koperindag		
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	78 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM							18 UMKM					
1.01	3.30.07.2.0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	78 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM	260.000.000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten	APBD			Masyarakat	18 UMKM	280.000.000	Dinas Koperindag		
1.02	3.30.07.2.0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	78 UMKM	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM	100.000.000	Lampung Barat dan Luar Kabupaten	APBD			Masyarakat	18 UMKM	130.000.000	Dinas Koperindag		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
		PDRB Sektor Industri (miliar rupiah)	380.312,2	351.349,8	351.349,8	358.376,7	1.842.700.000	Lampung Barat	APBD				Masyarakat	365.544	3.300.000.000	Dinas Koperindag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/ Renja Tahun 2021	Perkiraaan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
										11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	16%	16,02%	16,02%	4%	1.842.700.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	0	3.300.000.000	Dinas Koperindag			
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	8%	0,00%	0,00%	2%		Lampung Barat	APBD			Masyarakat	2		Dinas Koperindag			
3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1.842.700.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 Dokumen	3.300.000.000	Dinas Koperindag			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen						
3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 Dokumen	550.000.000	Dinas Koperindag			
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	842.700.000	Lampung Barat	APBD			Masyarakat	1 Dokumen	2.200.000.000	Dinas Koperindag			
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Lampung Barat	-			Masyarakat	1 Dokumen	550.000.000	Dinas Koperindag			



NIP. 19751229 199902 2 001